

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUSAHA KECIL
MENENGAH TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK
DI KOTA MAKASSAR

ANDRIANI MUSABIR
105730278211

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUSAHA KECIL MENENGAH TERHADAP
KESADARAN WAJIB PAJAK DI KOTA MAKASSAR**

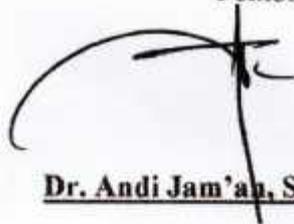
Nama : **ANDRIANI MUSABIR**
Stambuk : **10573 02782 11**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Telah diujikan pada tanggal 26 Februari 2016

Makassar, Februari 2016

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si

Pembimbing II



Saida Said, SE., M.Ak

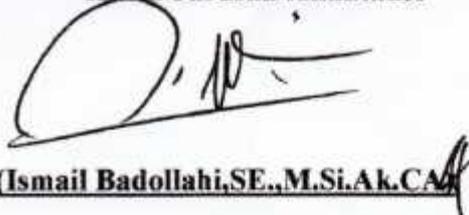
MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., M.A)
KYAM : 493794 NBM : 10734

Ketua Jurusan Akuntansi



(Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan teima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: Tahun 1437 H/ 2016 M dan telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Jumat 26 Februari 2016 sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada juusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2016

Panitia ujian:

Pengawas Umum : Dr Irwan Akib. M. Pd

(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung. M,A

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM

(WD. 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

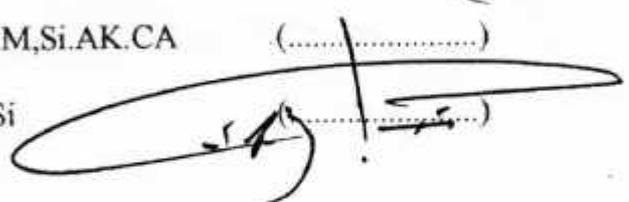
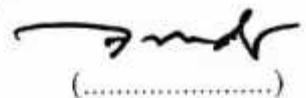
Penguji

1. Hj Naidah. SE.M,Si

2. Ismail Rosulong. SE,MM

3. Dr H Andi Rustam. SE.M,Si.AK.CA

4. Fadhul Adziem. SE.M,Si



MOTTO

“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain yang terbuka, namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain terbuka”

-Alexander Graham Bell-

..”Dan dimana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. albaqarah ayat :149)

Lebih baik terlambat, dari pada tidak wisuda sama sekali, just do it

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Kedua orang tuaku, ketiga kakakku,

Kedua adikku dan Aa tersayang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan ibu tersayang

Bapak Musabir dan (alm) Ibu Sitti

Mereka adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang

Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama ini walaupun diakhir pengerjaan skripsi ini engkau telah kembali kepada Sang khaliq ibu, semoga engkau bahagia disana.

Maaf tak sempat membahagiakanmu.

Kakak, Adik dan Aa Tersayang

Terimakasih atas dukungan serta do'a kalian.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Keluarga besar AK.10.11 yang telah mengenalkanku arti sebuah keluarga, sahabat dan arti kebersamaan.

ABSTRAK

Andriani Musabir, 105730278211 (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Menengah Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Di Kota Makassar), di bimbing oleh Bapak Andi Jam'an dan Ibu Saida Said.

Penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran wajib pajak dalam sektor usaha kecil menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pengusaha kecil menengah dalam membayar pajak, Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah yang terdaftar di (KKP) Pratama Makassar Utara, sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden.

Hasil dari penelitian ini di kumpulkan melalui kuesioner yang di analisis dengan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sample adalah *random sampling*, uji kualitas data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas *Pearson Correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbacts Alhpa*. Untuk uji hepotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji R^2 , yang sudah disesuaikan, uji f dan uji t.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman *system self assesment* dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak terhadap sektor usaha kecil menengah dengan nilai signifikansi 0,024 dan 0,000. Sedangkan variabel bebas seperti pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah dengan nilai signifikansi sebesar 0,760, akan tetapi dilakukan pengujian secara bersama-sama, semua variabel berpengaruh secara signifikansi dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

Kata Kunci : *pengusaha kecil, wajib pajak*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat kesehatan, kebahagiaan, keimanan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Menengah Terhadap Kesadaran Wajib pajak Di Kota Makassar”**. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada sekolah tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawahkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang seperti saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga khususnya Ayah dan Ibu tercinta atas kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan yang tulus yang telah diberikan kepada saya, semoga menjadi amal dalam proses menuntut ilmu. Sungguh ! Pengorbanan kalian tiada akan tergantikan apapun di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan skripsi ini mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini peneliti tak lupa pula menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak irwan Akib selaku Rektor Unismuh
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M,Si, Ak, CA, selaku ketua jurusan program studi akuntansi
4. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE. M. Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang membangun sehingga penyusun skripsi ini dapat penulis rampungkan.
5. Ibu Saida Said, SE., M. Ak, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang membangun sehingga penyusun skripsi ini dapat penulis rampungkan.
6. Ibu kepala kantor KPP Pratama Makassar Utara, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
7. Para pegawai dan staf di kantor KPP Pratama Makassar Utara, yang telah memberikan waktunya untuk membantu dalam penelitian ini.

8. Bapak dan ibu dosen yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu serta para asisten dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teristimewa buat kakak, Ahmad, Apdi, Juarding dan adek ku, Ati, Indar, Isha. Orang yang senantiasa memberiku semangat dan dorongan dalam proses tahap akhir perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Keponakan tersayangku Nurul Hilmia terimakasih karna telah memberikan saya semangat dan dorongan.
11. Dan teman-teman seperjuangan mahasiswa fakultas ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya AK.10.11
12. Sahabat-sahabat ku yang telah memberikan saran, kritikan dan motivasi baik itu dukungan moral dan spiritual, Masna, Fitri, Irha, Yusnani, Ayu dan Loqman. Serta semua yang tak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.
13. Buat sahabat dari masa kanak-kanak sampai saat ini, terimakasih karna kau tetap menjadi sahabatku yang selalu membantu saya baik dalam kondisi apapun, Nurhapsa, dan Akra Sari.
14. Teristimewa buat AaTersayang, terimakasih karna telah setia sampai saat ini, memberikan saya semangat, dukungan, motivasi dan doa.
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan masukan bagi penulis demi tercapainya skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Perpajakan.....	8
B. Jenis Pajak	9
C. Fungsi Pajak	11
D. Subjek Pajak.....	12
E. Pengetahuan Wajib Pajak	15
F. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
G. Hak dan Kewajiban Pajak	17
H. KesadaranWajib Pajak	20
I. Teori Pemungutan Pajak.....	21

J. Sistem Pemungutan Pajak	23
K. Industri Usaha Kecil Menengah.....	24
L. Kriteria Industri Usaha Kecil dan Menengah	25
M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	25
N. Penelitian Terdahulu	26
O. Kerangka Pikir.....	27
P. Hipotesis	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Metode Pengumpulan Data	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Metode Analisis Data	33
IV GAMBARAN UMUM INSTANSI	
1. Sejarah Singkat KPP Makassar Utara.....	40
2. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja	41
3. Tugas Dan Tanggung Jawab	41
4. Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama Makassar Utara.....	47
5. Stuktur Organisasi	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Statitik Deskriptif Responden	50
B. Uji Kualitas Data	52
1. Hasil Uji Validitas	52
2. Hasil Uji Reliabilitas	54
C. Uji Asumsi Klasik	55
1. Uji Multikolinieritas	55
2. Uji Normalitas	56

3. Uji Heteroskedastisitas	57
D. Uji Hipotesis	58
1. Uji koefisien determinasi.....	58
2. Hasil Uji t Statistik	59
3. Hasil Uji Simultan (uji f).....	61
E. Pembahasan	62
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak.....	62
2. Pengaruh Pemahaman <i>System Self Assesment</i>	63
3. Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak.....	63
4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman System Self Assesment, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah.....	64
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBN-P Realisasi Penerimaan Perpajakan	1
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah	25
Tabel 3.1 Oprasional Variabel	38
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.2 Uji Validitas	53
Tabel 4.3 Uji Realibilitas	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4. 6 Hasil Uji t Statistik	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikasi Simultan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian	28
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	56
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Riset Penelitian
Lampiran II	Skor Jawaban Penelitian
Lampiran III	Kuesioner Penelitian
Lampiran IV	Hasil Uji Validitas
Lampiran V	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran VI	Hasil Uji Metode Regresi Berganda
Lampiran VII	Hasil Uji Normalitas
Lampiran VIII	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Lampiran IX	Hasil Uji Persial X Simultan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebenarnya sudah di kenal dan di praktekkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk menyerahkan upeti kepada raja yang besarnya sudah di tentukan. Pemungutan pajak atau upeti ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan belanda, bahkan setelah Indonesia merdeka pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun oleh pemerintah.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Supramono dan damayanti (2010 : 11) mengatakan bahwa sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memberi kontribusi terbesar pada APBN mencapai 80% . berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui APBN-P dan realisasi penerimaan perpajakan dari tahun 2007-2011 dapat di ketahui hasilnya pada tabel 1.1

TABEL 1.1

APBN-P DAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN

(Miliar Rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	% Terhadap APBN-P
2007	489.891,8	490.988	100,2
2008	6029.227,4	658.700,8	108,1
2009	651.954,8	641.379,9	98,4
2010	743,325,9	223.309,7	97,3
2011	878.685,2	873,735	99,4

Sumber : nota keuangan APBN-P tahun anggaran 2007-2011(data diolah kembali)

Jika dilihat dari tabel APBN-P yang merupakan asumsi terhadap persentase terhadap target pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kebutuhan penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat namun realisasi penerimaan mengalami penurunan.

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi dan pelayanan pajak. Suandi (2002:129) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar Wajib Pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegakkan secara benar maka para Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara. Perkembangan usaha kecil dan menengah diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jenderal pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian intensif pajak yang sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday* (Wibowo, 2004 dalam Zahidah, 2010).

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. Pungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut Undang-undang perpajakan, Indonesia menganut *system self*

assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak wajib pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungut pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini

bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Selain dari fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu : fungsi *stabilitas*, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi (Diana Sari,2013:37)

Sejak tahun 1984 indonesia menganut sistem *self assesment* yang sebelumnya menganut *official assesment system* (Supramono dan Damayanti, 2010:4). Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas,2000:10).

Fungsi KPP yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak (Selayang Pandang,2012). dilihat dari fungsi KPP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KPP membantu Direktorat Jendral Pajak dalam menyadarkan pentingnya pajak kepada masarakat. Karena pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan, masarakat diharapkan mampu berperan dalam pembangunan negara dengan cara patuh dalam membayar pajak, sebagai bentuk kesadaran.

\

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah ?
2. Apakah pemahaman *system self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah ?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman *system self assesment* terhadap kesadaran wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Usaha kecil Menengah Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak pada sektor usaha kecil menengah, karena merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar untuk membangun negara ini.
- b. Masyarakat Sebagai sumbangan pemikiran terutama dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari

pengetahuan yang dipelajari dibangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai perpajakan.

- c. Penulis berharap penelitian ini mampu memenuhi sidang sarjana ekonomi jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. dan dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha kecil menengah terhadap kesadaran wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Perpajakan

Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dalam (Diana sari, 2013,33) adalah sebagai berikut :

Anderson, W.H.

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan kepada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.”

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat, SH. Dalam buku (Mardiasmo, 2011 : 1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak yaitu iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2010:3). Undang-undang perpajakan terbaru nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriandi, 2008 :4).

Berdasarkan definisi di atas, pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasar undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung.

B. Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungutan dan berdasarkan sifat (Suandi, 2005:37).

1. Berdasarkan Golongan Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu : pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan Wewenang Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi dua, yaitu : pajak pusat dan pajak daerah.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak reklame.

3. Berdasarkan Sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Suandi, 2005 :40).

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar , jadi pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja, seperti pajak pertambahan.

C. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi kepada dua fungsi, yaitu fungsi utility dan fungsi regulered (Suandi, 2005:14)

a. Fungsi Utility (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas Negara sebanyak-banyaknya, antara lain untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan mengerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan ekonomi yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subyek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi. Dengan kata lain, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak selain fungsi utility dan fungsi regulered terdapat juga fungsi distribusi kekayaan. Fungsi distribusi kekayaan yaitu fungsi dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar (Dudi, 2008). Berdasarkan hal ini, pajak mempunyai beberapa fungsi kepada masyarakat yaitu fungsi utility, regulered dan fungsi distribusi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, maka diharapkan

pajak dapat lebih berperan lagi khususnya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan membiayai pengeluaran.

D. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek atau wajib pajak, tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

1. Yang Menjadi Subjek Pajak

Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah :

- a. Orang Pribadi
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri,

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu Subjek dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 4. Pembukuaanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

2. Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain :

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
 - b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
 - c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib memberitahukan Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
3. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

E. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Martin dan Oxman dalam buku (Kusrini,2006:3) devenisi dari pengetahuan adalah :

“pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempersentasekannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek,”

Sedangkan pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Caroline yang dikutip oleh (Lisnawati,2012) adalah :

“Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakannya.”

Berdasarkan pengertian diatas konsep dari pengetahuan pajak yaitu suatu sikap pola pikir, pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1983 pasal 1 ayat (2) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah :

“Orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

Sedangkan menurut peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalianpendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 1 yang dimaksud dengan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib pajak patuh ialah wajib pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

G. Hak dan Kewajiban Wajib pajak

Undang-undang mengatur dengan tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal secara jelas. Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, antara lain (Dinas Pelayanan Pajak, 2007):

1. Hak wajib pajak
 - a. Dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTD paling lama dua bulan (pasal 8).
 - b. Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhir masa pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (pasal 9/1).
 - c. Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan (pasal 11/5).
 - d. Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKP (Pasal 33/1, 4).
 - e. Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu yang ditetapkan paling lama 12 bulan (pasal 34/3).

- f. Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan.
- g. Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding (pasal 42/1).
- h. Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon penjualan/bill (pasal 25/5).
- i. Mengajukan permohonan keberatan (Pasal 35/1).
- j. Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari) atas :
 - a) Surat teguran sejak diterima wajib pajak
 - b) Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajib pajak
 - c) Pelaksanaan sita sejak BAP dibuat
 - d) Lelang, sejak pengumuman lelang dibuat
- k. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (pasal 41/1).

2. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (pasal 6/1,3).
- b. Menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang (pasal 10/1, 2).
- c. Melegalisasi bon penjualan.
- d. Membayar pajak yang terhutang paling lambat 15 hari kerja (pasal 15/1).

- e. Membayar kekurangan pajak dalam DPP kurang dari 30 hari (pasal 15/2).
- f. Membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan pajak (pasal 33/3).
- g. Mengajukan keberatan dan tidak menunda kewajiban membayar (pasal 33/6).
- h. Memberikan keterangan atau meminjamkan buku pada saat pemeriksaan (pasal 46/2).
- i. Membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang pada saat mengajukan banding (pasal 37/1, 7)
- j. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak dengan pendapatan bruto lebih dari Rp. 300.000.000 (pasal 45/1).
- k. Melakukan pencatatan pendapatan bruto untuk wajib pajak dengan peredaran pendapatan bruto lebih dari Rp. 300.000.000.

Menurut Chairuddin (2010), hak-hak wajib pajak antara lain :

- a. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
- b. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- c. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- d. Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

- e. Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- f. Wajib Pajak pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu misalnya karena bencana alam dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Menurut Chairuddin (2010), kewajiban wajib pajak antara lain :

- a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha yang diperlukan oleh fiskus.
- b. Memberi kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberi keterangan lisan dan tertulis yang diminta fiskus.

H. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan (Freira, 2010). Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padilla dan Prior,

2010). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, Hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self Assessment* sistem dimana wajib diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang nya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

I. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima yaitu: teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak dan teori daya beli. Uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut (Suandi, 2005:24) :

a. Teori asuransi

adalah tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingan. Teori ini untuk member dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa ahli menentangnya karena perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat, karena dalam hal kerugian tidak ada penggantian secara langsung dari Negara, selain itu pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat hubungan secara langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori yang hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut oleh semua penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing dalam tugas pemerintah.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menceritakan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama beratnya, dimana pajak harus dibayar dengan sesuai dengan daya pikul masing-masing individu tersebut. Teori daya pikul menggunakan dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Teori ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang warga Negara yang baik, harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menggambarkan mengenai akibat dari pemungutan pajak, maka Negara yang menerima pajak dari warga Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Negara sebagai tempat pemungut pajak, akan menyalurkannya kembali pajak tersebut ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai setiap pengeluaran Negara. Dengan adanya teori pemungutan pajak ini, maka setiap warga akan menyadari mengenai alasan dilakukannya pemungutan pajak.

J. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding Assesment System* (Resmi, 2005:10)

1. Official Assesment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh fiskus, ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang terletak pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang, ciri-cirinya:

- a. Mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding Assesment System

Withholding Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajaknya terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang

dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga.

K. Industri Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang (M.Tohar, 2001:1).

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia (Adi, 2007:12).

Zulkarnain mendefinisikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai (Zulkarnain, 2006:125) :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

- d. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dari definisi diatas usaha kecil dapat disimpulkan bahwa di dalam usaha kecil ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemusatan kepemilikan dan pengawasan di tangan seseorang atau beberapa orang,
2. Terbatasnya pemisahan dalam perusahaan.

L. Kriteria Industri Usaha kecil dan Menengah

Industri usaha kecil dan menengah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Kriteria industri usaha kecil dan menengah akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha mikro	50 juta	300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta-10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : (Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM)

M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan pelaporan perpajakan, sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi

kendala dan hambatan dalam melakukan pembayaran pajak pada usaha kecil menengah (Tatiana Vanessa Rantung 2009,):

1. Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah suatu sikap pola pikir, pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Pemahaman *self assesment system*

Pemahaman *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Dimana mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada wajib pajak sendiri.

3. Tingkat penghasilan wajib pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak dimana, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

N. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian Nurseto (2007), semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Penelitian Malik (2007), pemahaman *system self assesment* berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Penelitian Yusrinillah (2006), tingkat penghasilan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.
4. Penelitian Prasetyo (2006), pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tentang pajak dan mampaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

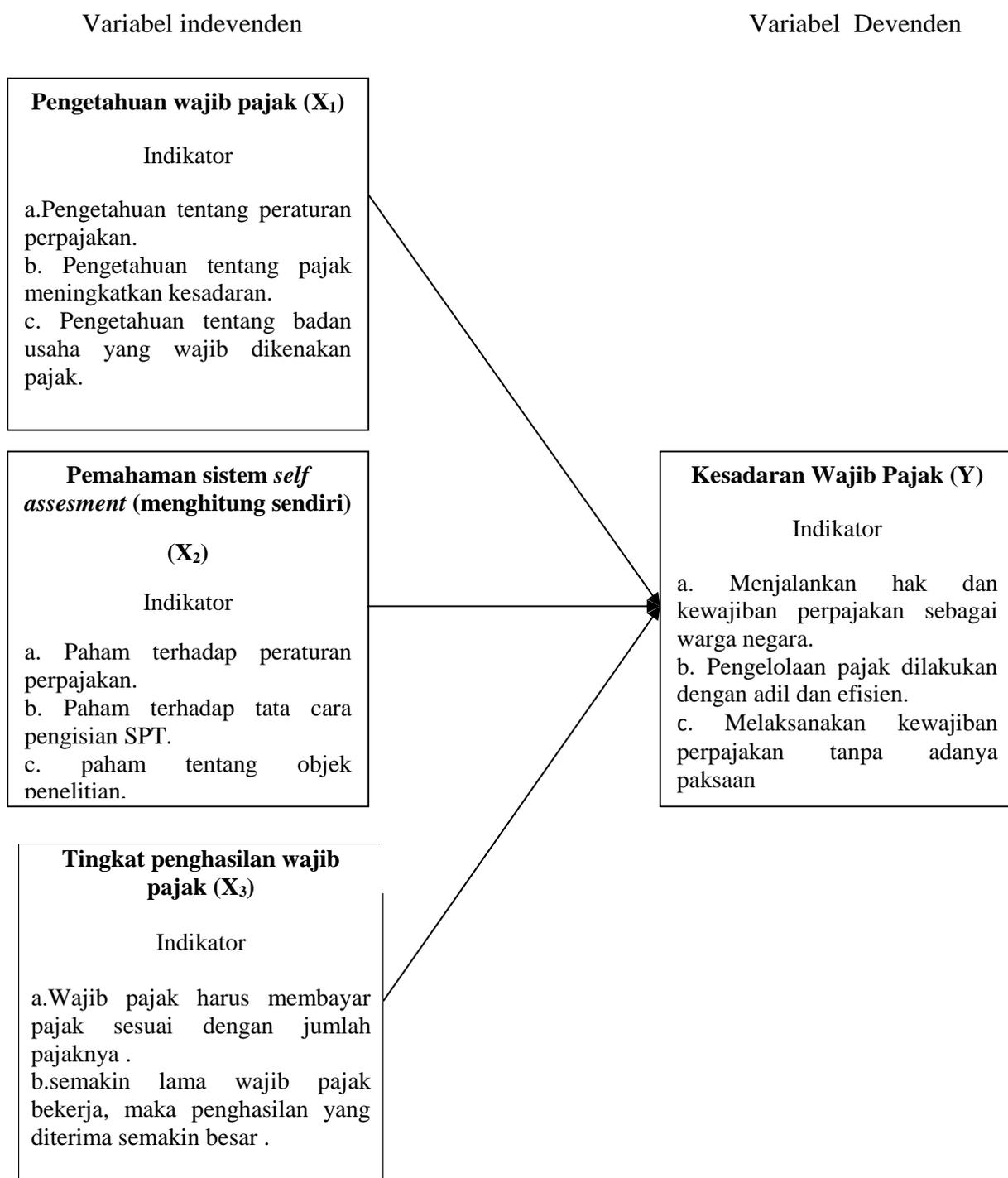
O. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dari tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan (Hamid, 2007).

Pajak merupakan penghasilan negara yang saat ini sudah diandalkan sebagai modal pembangunan. Pemerintah mencoba untuk merubah kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah untuk memenuhi kewajibannya, yang semula tidak mengerti sama sekali masalah pajak sedikit demi sedikit diberikan penyuluhan mengenai perpajakan agar pengusaha usaha kecil dan menengah memahami dan mematuhi mengenai kewajiban perpajakannya. Selain itu, Pemahaman *system self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assesment* dan tingkat penghasilan wajib pajak usaha kecil dan menengah. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model penelitian



P. Hipotesis

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

Penelitian Nurseto (2002) menunjukkan bahwa persepsi tentang pajak dan tingkat pendidikan dapat memberikan sumbangan efektif terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 37,15%. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak semakin signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, analisis hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

2. Pemahaman *system self assesment* terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah

Penelitian yang dilakukan oleh Malik (2007) menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh terhadap pelaksanaan *system self assesment* dengan persentase pengaruh sebesar 31,2%. Jadi pemahaman *system self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha menengah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, analisis hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

H₂: Pemahaman *system self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

3. Tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrinillah (2006) menunjukkan bahwa jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan hasil signifikansi 5%. Jadi tingkat penghasilan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, analisis hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

H₃: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha menengah.

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Alamat jalan Urip sumoharjo KM. 4 GKN I. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan 2 hari pada tanggal 28 September sampai 30 Oktober 2015.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian.

b. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan dan mengajukannya kepada responden.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan atau uraian yang diperoleh sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara *survey*. Dalam penelitian *survey* ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak usaha kecil menengah di KPP Pratama Makassar Utara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sektor usaha kecil menengah yang terdaftar di KPP Pratama Makassar utara. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah yang terdaftar di KPP Pratama Makassar utara. Target sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha kecil menengah sebanyak 50 Responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode *Random Sampling*.

E. Metode Analisis Data

Model dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi berganda. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrument pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Sosial Sciense*). Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Ket :

Y = Kesadaran wajib pajak dalam sektor usaha kecil menengah

X₁ = Pengetahuan wajib pajak

X₂ = Pemahaman sistem *self assessment*

X₃ = tingkat penghasilan wajib pajak

β₀ = Konstant

β₁, β₂, β₃, = Koefisien Regresi variabel X₁, X₂, X₃

e = error

1. Uji Kualitas Data

- a. Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji realibilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari

kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali.

- b. Uji Validitas adalah suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Person Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2009:45).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians pada residual (*error*) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot (*scatterplot*) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi 30 gejala heteroskedastisitas pada regresi ini, sehingga model regresi yang dilakukan layak dipakai (Ghozali,2005).

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 0,10$ dan nilai $tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

c. Uji normalitas

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu :

1. signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal. Selain melihat nilai signifikansi dari uji Kolmogorov-Smirnov, untuk melihat apakah suatu data mempunyai distribusi normal dapat dilihat dari melihat grafik.

3. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Sugiyono, 2009). Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval dan rasio dalam suatu persamaan linear. Variabel independen terdiri dari pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, dan sikap optimis wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kesadaran pelaporan kewajiban perpajakan.

Dalam Uji hipotesis ini dilakukan melalui:

a. Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali,2009:84). Dasar pengambil keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat

2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel independen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05% (Ghozali,2009:84). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Tabel 3.1
Indikator Variabel dan Skala Pengukuran

No.	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan wajib pajak (Qomaria, 2008). (X ₁)	Pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.	a. pengetahuan tentang peraturan perpajakan. b. pengetahuan tentang bada usaha yang wajib dikenakan pajak. c. Pengetahuan tentang pajak meningkatkan kesadaran.	Interval
2	Pemahaman <i>system self assesment</i> (Malik, 2007). (X ₂)	Wajib pajak harus memahami mengenai <i>system self assesment</i> , karena semakin tinggi pemahaman mengenai <i>system</i> tersebut maka wajib pajak lebih mudah memahami dalam mengisi surat pemberitahuan.	a. Paham terhadap peraturan perpajakan. b. Paham terhadap tata cara pengisian SPT. c. Paham tentang obyek pajak.	Interval

3	<p>Tingkat penghasilan wajib pajak (Yusrinillah, 2006). (X₃)</p>	<p>Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha menengah.</p>	<p>a. Wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajaknya b. semakin lama wajib pajak bekerja, maka penghasilan yang diterima semakin besar</p>	Interval
4	<p>Kesadaran kewajiban perpajakan (Tarjo, 2005 dan Tatiana, 2009). (Y)</p>	<p>Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya</p>	<p>a. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara. b. Pengelolaan pajak dilakukan dengan adil dan efisien. c. Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan.</p>	Interval

IV. GAMBARAN UMUM INSTANSI

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi kantor pajak yang bertugas untuk memungut pajak disekitar provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama “*Inspectie Van Financien*”

Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak sedang untuk Daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang berkembang seperti Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Kantor Inspeksi Makassar

Kantor Inspeksi Pajak Makassar wilayahnya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (SUSELBARTRA).

b. Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor: KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Kantor Pelayanan Pajak adalah sebuah lembaga perwakilan milik Direktorat Jenderal Pajak di setiap daerah yang masing-masing bertugas sesuai fungsinya dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiyah kerjanya.

2. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Utara terletak di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Makassar 90232. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Utara meliputi: Kec. Wajo, Kec. Ujung Tanah, Kec. Tallo, kec. Bontoala, Kec. Biringkanaya dan Kec. Tamalanrea.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian

1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak

- a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

- b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
- c) Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
- d) Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
- e) Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2) Sub Bagian Umum

- a) Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan dari wajib pajak.
- b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan pajak.
- c) Melaksanakan pemerosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak).
- d) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
- e) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

- a) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
- c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- d) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
- e) Melaksanakan perbaikan (*updating*) data.
- f) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.

4) Seksi Pelayanan

- a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
- b) Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
- c) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan produk hukum lainnya.

- e) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

5) Seksi Penagihan

- a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
- b) Melaksanakan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / STP / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- c) Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP.
- d) Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding.
- e) Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

6) Seksi Pemeriksaan

- a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.

- b) Menyusun daftar nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- c) Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak.
- d) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

7) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I s/d IV

- a) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak.
- d) Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data Wajib Pajak (*Data Matching*).

8) Seksi Ekstensifikasi

- a) Melakukan pemerosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
- b) Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP.
- c) Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
- d) Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- e) Menetapkan penerbitan daftar *nominative* untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan.
 - b. Pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan.
- b) Melakukan penilaian PBB
 - a. Pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak.
 - b. Melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/ badan.

10) Tempat Pelayanan Terpadu

- a) Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat permohonan, dan surat lainnya dari wajib pajak.

- b) Menyelesaikan register harian SPT Masa semua jenis pajak dari wajib pajak, objek pajak, dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- c) Menerbitkan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKP, SKB, dan lain-lain.
- d) Melaksanakan proses penyelesaian permohonan wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

4. Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama Makassar Utara

- a) Visi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang menyelenggaraan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
- b) Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
- c) Nilai KPP Pratama Makassar Utara antara lain sebagai berikut.
 - 1. Integritas "Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang

diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji."

2. Profesionalisme "Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial."
3. Inovasi "Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku."
4. *Teamwork* "Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan."

5. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Makassar Utara



Sumber : PDI KKP Pratama Makassar Utara

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak usaha kecil menengah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan mendatangi KPP Pratama Makassar Utara dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak usaha kecil menengah yang berada di KPP Pratama Makassar Utara. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan 2 hari.

Kuesioner yang disebar sejumlah 50 kuesioner, dengan jumlah pertanyaan 24 item. 16 Pertanyaan untuk variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak, pemaahaman sistem *self assesment* dan tingkat penghasilan wajib pajak, sedangkan variabel terikat yaitu kesadaran wajib pajak berjumlah 8 pertanyaan.

Responden dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah yang berada di wilayah Makassar Utara. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas Responden penelitian yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama usaha yang dijalani, dan keuntungan yang diperoleh setiap bulan. Untuk mengetahui karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Statistik Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
1. Jenis Kelamin	a. laki-laki	24 orang	48%
	b. perempuan	26 orang	52%
2. Status	a. menikah	31 orang	62%
	b. belum menikah	19 orang	38%
3. Umur	a. < 20 tahun	1 orang	2%
	b. 20-30 tahun	18 orang	36%
	c. 31-40 tahun	21 orang	4%
	d. 41-50 tahun	8 orang	16%
	e. > 50 tahun	2 orang	4%
4. Pendidikan	a. SD	-	
	b. SMP	6 orang	12%
	c. SMA	17 orang	34%
	d. S1	24 orang	48%
	e. lainnya	3 Orang	6%
5. Lama Usaha	a. < 2 tahun	7 orang	14%
	b. 2-4 tahun	17 orang	34%
	c. 4-6 tahun	9 orang	18%
	d. 6-8 tahun	11 orang	2%
	e. > 8 tahun	6 orang	12%
6. Laba Bersih Sebulan	a. < 5 juta	15 orang	30%
	b. 5-10 juta	18 orang	36%
	c. 10-15 juta	11 orang	22%
	d. 15-20 juta	5 Orang	10%
	e. > 20 juta	1 orang	2%

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan hampir sama, laki-laki berjumlah 24 responden dan perempuan 26 responden. Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut ada 1 responden yang berumur 20 tahun kebawah, usia responden yang berumur 20-30 yaitu 18 orang, kemudian responden yang berumur 31-40 lebih banyak yaitu 21 orang, dan responden yang berumur 41-50 ada 8 orang dan responden yang berusia 50 tahun keatas 2 orang.

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SMP sederajat dengan kategori non perguruan tinggi sebanyak 6 orang, sedangkan pendidikan SMA sederajat berjumlah 17 orang, kemudian perguruan tinggi S1 berjumlah 24 orang dan perguruan tinggi lainnya berjumlah 3 orang.

Artinya, kondisi ini menggambarkan bahwa wajib pajak usaha kecil menengah yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebagian besar berpendidikan menengah pertama hingga perguruan tinggi, kemudian berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini jumlah responden yang telah menikah yaitu berjumlah 31 orang dan yang belum menikah yaitu 19 orang.

B. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assesment*, tingkat penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
PNGTHUAN 1	0,848**	0,000	Valid
PNGTHUAN 2	0,862**	0,000	Valid
PNGTHUAN 3	0,890**	0,000	Valid
PNGTHUAN 4	0,708**	0,000	Valid
PNGTHUAN 5	0,669**	0,000	Valid
SSA 1	0,532**	0,000	Valid
SSA 2	0,554**	0,000	Valid
SSA 3	0,354*	0,012	Valid
SSA 4	0,594**	0,000	Valid
SSA 5	0,566**	0,000	Valid
SSA 6	0,529**	0,000	Valid
SSA 7	0,521**	0,000	Valid
PNGHSLN 1	0,501**	0,000	Valid
PNGHSLN 2	0,832**	0,000	Valid
PNGHSLN 3	0,864**	0,000	Valid
PNGHSLN 4	0,632**	0,000	Valid
KSDRN 1	0,658**	0,000	Valid
KSDRN 2	0,384**	0,006	Valid
KSDRN 3	0,574**	0,001	Valid
KSDRN 4	0,594**	0,000	Valid
KSDRN 5	0,560**	0,002	Valid
KSDRN 6	0,670**	0,000	Valid
KSDRN 7	0,510**	0,002	Valid
KSDRN 8	0,309*	0,029	Valid

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4.2 menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assment*, tingkat penghasiln wajib pajak dan kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah untuk setiap pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuisisioner tersebut.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji Reliabilitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assesment*, tingkat penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak	0,787	Reliabel
Pemahaman sistem <i>self assesment</i>	0,709	Reliabel
Tingkat penghasilan wajib pajak	0,785	Reliabel
Kesadaran wajib pajak	0,719	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4.3 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,787, pemahaan sistem *self assesment* sebesar 0,709, tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,785, dan kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah sebesar 0,719. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisioner ini reliabel karna mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebi besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban yang sebelumnya.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai hasil uji Multikolinieritas, dimana tidak terdapat problem multikolinieritas pada model persamaan regresi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	14,513	4,142		3,504	,001		
PENGETAHUAN	-,022	,071	-,035	-,307	,760	,957	1,045
SELFASSESSMENT	,345	,148	,287	2,327	,024	,823	1,215
PEN GHASILAN	,579	,144	,488	4,018	,000	,846	1,182

a. Dependent Variable: KESADARAN

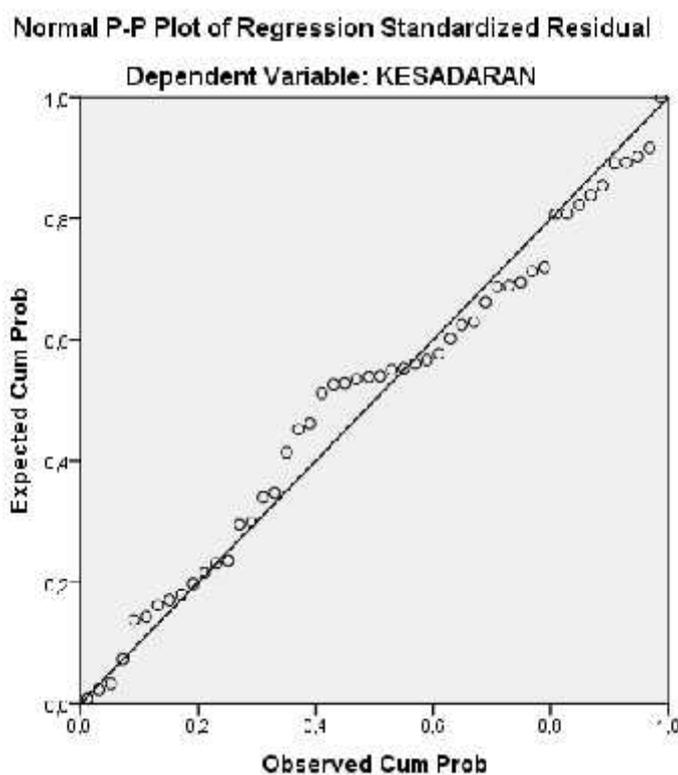
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.4, terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar setiap angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* 0,957; 0,823; 0,846, serta VIF

sebesar 1,045 untuk variabel pengetahuan wajib pajak, 1,215 untuk variabel sistem *self assesment*, 1,182 untuk variabel tingkat penghasilan wajib pajak.

2. Hasil Uji Normalitas

Gambar dibawah ini menjelaskan mengenai hasil uji normalitas, dimana gambar tersebut memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



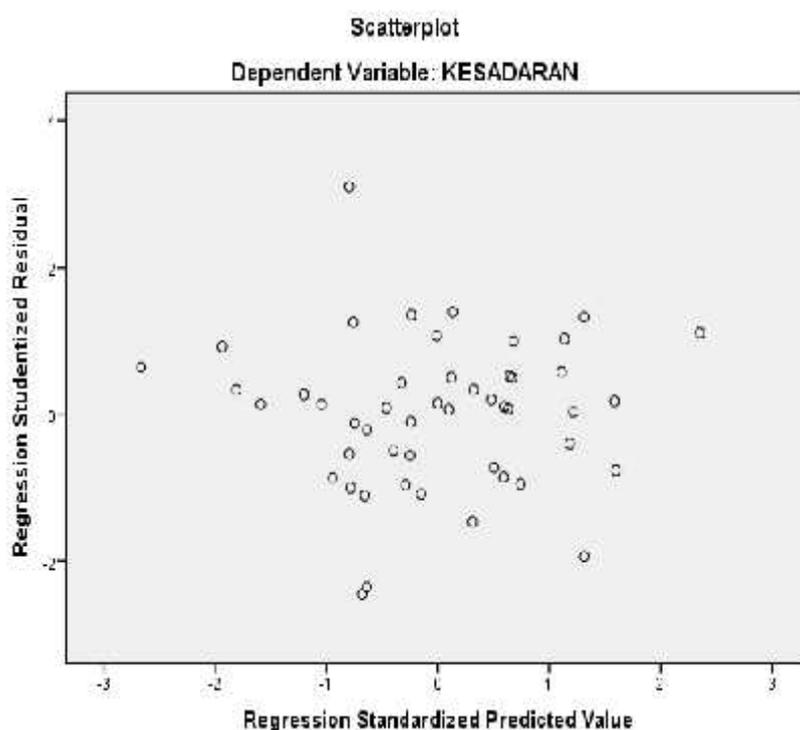
Sumber: Data primer diolah

Gambar 4.2

Hasil uji normalitas menggunakan grafik p-plot

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar dibawah ini menjelaskan ada tidaknya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, yang diperlihatkan pada gambar 4.3.



Sumber: Data primer diolah

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan grafik scctterplot

Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan diawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil

menengah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assesment*, dan tingkat penghasilan wajib pajak.

D. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yaitu:

1. Uji koefisien determinasi

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai besarnya nilai persentase keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Tabel 4.5
Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 ^a	,425	,388	2,239

a. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SELFASSESSMENT

b. Dependent Variable: KESADARAN

Sumber : Data primer diolah

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,652 atau 65,2%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Nilai adjusted R Square sebesar 0,388 atau 38,8% menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib

pajak, pemahaman sistem self assesment dan tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,388 atau 38,8%

2. Hasil Uji t Statistik

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.6 jika nilai probabilitas t lebi kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan jika nilai probabilita t lebi besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a di tolak.

Tabel 4.6
Hasl uji t statistik

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,513	4,142		3,504	,001
PENGETAHUAN	-,022	,071	-,035	-,307	,760
SELFASSESSMENT	,345	,148	,287	2,327	,024
PENGHASILAN	,579	,144	,488	4,018	,000

a. Dependent Variable: KESADARAN

Sumber: Data primer diolah

Hasil Uji Hipotesis 1:

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,760. Hal ini berarti

menolak H_1 , sehingga variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengetahuan wajib pajak lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 2:

Pengaruh Pemahaman Sistem *Self Assesment* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel pemahaman sistem *self asesment* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,024. Hal ini berarti menerima H_2 , sehingga variabel pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh secara signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemahaman sistem *self assesment* lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 3:

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah.

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel tingkat penghasilan wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti menerima H_3 , sehingga variabel tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tingkat penghasilan wajib pajak lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 14,513 - 0,022X_1 + 0,345X_2 + 0,576X_3 + e$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Ket :

Y = Kesadaran wajib pajak dalam sektor usaha kecil menengah

X₁ = Pengetahuan wajib pajak

X₂ = Pemahaman sistem *self assessment*

X₃ = tingkat penghasilan wajib pajak

β₀ = Konstant

β₁, β₂, β₃, = Koefisien Regresi variabel X₁, X₂, X₃

e = error

Maka, apabila disetiap peningkatan pengetahuan wajib pajak (X₁) satu satuan kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah akan menurun sebesar -0,022 pertahun, kemudian setiap peningkatan pemahaman sistem *self assesment* (X₂) satu satuan maka kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah akan meningkat sebesar 0,345 pertahun, setiap peningkatan tingkat penghasilan wajib pajak (X₃) satu satuan maka kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah akan meningkat sebesar 0,576 pertahun.

3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.7, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a .

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,634	3	56,878	11,347	,000 ^b
	Residual	230,586	46	5,013		
	Total	401,220	49			

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SELFASSESSMENT

Sumber: Data primer diolah

Hasil Uji Hipotesis 4:

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Sistem *Self Assesment*, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah.

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.7, nilai F diperoleh sebesar 11,347 dengan tingkat signfikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima, sehingga variabel pengetahuan wajib

pajak, variabel pemahaman sistem *self assesment*, variabel tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

E. Pembahasan

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak

Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,760, lebih besar dari 0,05, sehingga pengetahuan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Hal ini dapat disebabkan karena walaupun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan belum tentu berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, dikarenakan semakin paham seseorang tentang pengetahuan wajib pajak tentang pajak maka akan semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurseto (2002).

2. Pemahaman Sistem *Self Assesment*

Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Pemahaman Sistem *Self Assesment* sebesar 0,024, lebih kecil dari 0,05, sehingga pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Hal ini dapat disebabkan karena, semakin tinggi tingkat pemahaman sistem *self assesment* maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini konsisten

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malik (2007) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sehingga tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Hal ini dapat disebabkan semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, dikarenakan semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang maka semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusrinillah (2006) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Sistem *Self Assesment*, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assesment*, tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self*

assesment, tingkat penghasilan wajib pajak maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assesment* dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang pemilik usaha kecil menengah yang berada di wilayah kota Makassar. Berdasarkan dari data yang dilakukan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda maka, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,760, lebih besar dari 0,05, sehingga pengetahuan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Hasil pengujian pertama adalah pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurseto (2002) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesadaran kewajiban perpajakan.

2. Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Pemahaman Sistem *Self Assesment* sebesar 0,024,

lebih kecil dari 0,05, sehingga pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Hasil pengujian ke dua adalah pemahaman *system self assesment* berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malik (2007) yang menyatakan bahwa pemahaman *system self assesment* berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Hasil uji Hipotesis berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sehingga tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah.

Hasil pengujian ke tiga adalah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil menengah. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusrinillah (2006) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

4. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.7, nilai F diperoleh sebesar 11,347 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima, sehingga Pengetahuan wajib pajak,

pemahaman *system self assesment* dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah.

Hasil penelitian ini signifikan dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2006).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait penulisan skripsi antara lain :

1. Bagi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, mengingat pentingnya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak, maka dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak.
2. Bagi usaha kecil dan menengah harus mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan pajak yang baik sehingga pengetahuan dan pemahaman akan semakin bertambah luas. Hal ini diharapkan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat di karenakan wajib pajak telah memahami mengenai peraturan perpajakan dan pentingnya pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini, di harapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya mengambil satu sampel pada kantor pelayanan pajak (KPP) saja melainkan beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) sehingga di peroleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi lebih tinggi.

4. Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2008. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. *Tentang Usaha mikro, kecil dan menengah*.
- Nomor 192/PMK.03/2007 *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak*
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*
- Adi, 2007, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Adriani, 2010 . *Pengertian Pajak* , Edisi Indonesia Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Chairuddin,2010. *Hak dan Kewajiban Pajak* artikel diakses tanggal 24 Maret 2010, dari <http://slidepajak.wordpress.com/2010/3/24/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>.
- Diana Sari.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*.Bandung.PT Refika Aditama
- Dinas Pelayanan Pajak Pemprov Dki Jakarta.” *Hak Dan Kewajiban Pajak*”, artikel diakses tanggal 4 Agustus 2007, dari <http://dipenda.jakarta.go.id/modules/perundangan/item.php?itemid=30>.
- Direktorat Jendral Pajak 2012. *Selayang pandang* melalui www.pajak.co.id (Diakses 2 juli 2013)
- Dudi,2008. “ *Pajak, Pengertian dan Fungsinya*”, artikel diakses tanggal 22 November 2008, dari <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pajak-pengertian-danfungsinya>.
- Ferry Dwi Prasetyo.” *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta*,” Skripsi UII, Jogjakarta, 2006.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting, 2013. *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dibiaya kepatuhan wajib pajak UMKM. Tax dan Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013. Universitas Kristen Petra.
- Ghozali, 2009. ” *Aplikasi Multivariate Program SPSS* ”, Universitas Diponegoro.
- Hamid, Abdul.” *Buku Panduan Penulisan Skripsi* ”, FEIS,Jakarta,2007.
- Kusrini. 2006. *Sistem pakar teori dan aplikasi*, Yogyakarta : Amikom

- Lisnawati. 2012 *pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Unikom. Bandung
- Mardiasno,2004 .'' *Akuntansi Perpajakan*'', Andi Yogyakarta, Yogyakarta,2004.
- M. Tohar, 2001, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Nota Keuangan dan APBN. Diakses melalui www.anggaran.depkeu.go.id tanggal 21 Agustus 2013
- Nurseto, 2002. “ *Pengaruh Persepsi Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak*” . Jurnal Akuntansi Perpajakan.
- Padila dan Prior,2010. ''*Kesadaran*'', artikel diakses tanggal 24 Maret 2010, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>
- Paulo Freira,2010. '' *Pengertian kesadaran*'' , artikel diakses tanggal 24 Maret 2010, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>
- Primandita Fitriandi,Tejo birowo,Yuda Aryanto, 2008.'' *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*'' , Salemba Empat: Jakarta, 2008
- Qomaria Sitti , 2008. “ *Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak*. Jurnal Akuntansi Perpajakan
- Resmi Siti ,2005. '' *Perpajakan Teori dan Kasus*'', buku 1 edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Suandi Erly,2005 .'' *Hukum Pajak*'', Salemba Empat, Jakarta,2005
- Sugiono, “*statistik untuk penelitian*”, Alfabeta, Jakarta,2009
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan indonesia*. CV Andi : Yogyakarta
- Tarjo,2003. '' *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Surabaya,2003
- Tatiana Vanessa Rantung,2009. '' *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Wajib Pajak*'' , Salatiga, 2009
- Undang-Undang NO.28 tahun 2007. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, pasal 1 ayat (1) (2)
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2000. *Perpajakan indonesia*. Jakarta:salemba empat

Yusrinillah, 2006. '' *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib pajak Terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Pajak*'', Skripsi UIN, Jakarta, 2006

Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban pengusaha usaha kecil menengah (UKM) di wilayah jakarta selatan*. Skripsi. Universitas Islam Hidayatullah Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, Yogyakarta.

L

A

M

P

I

R

A

N

Makassar, September 2015

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian studi saya :

Nama : Andriani Musabir

NIM : 105730278211

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis/Akuntansi

Universitas : Muhammadiyah Makassar

Saya hendak melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Menengah Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Di Kota Makassar**”, Untuk itu saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i Untuk berkenan mengisi kuisisioner yang di lampirkan bersama surat ini.

Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah sangat tergantung dari hasil kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sehingga saya mengharapkan agar Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menjawab dengan sejujurnya, apabila salah satu nomor yang tidak di isi maka kuisisioner dianggap tidak berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Andriani Musabir

A. Data Responden :

Beri tanda silang (X) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

- Jenis Kelamin : () laki-laki () perempuan
- Status : () Menikah () Belum Menikah
- Umur : () <20 tahun
: () 20-30 tahun
: () 31-40 tahun
: () 41-50 tahun
: () >50 tahun
- Pendidikan Terakhir : () SD
: () SMP
: () SMA
: () S1
: () lainnya
- Lama Usaha Yang Dijalani : () < 2 tahun
: () 2-4 tahun
: () 4-6 tahun
: () 6-8 tahun
: () >8 tahun
- Laba Bersih Sebulan : () < RP. 5.000.000
: () RP. 5.000.000 – RP. 10.000.000
: () RP. 10.000.000 – RP. 15.000.000
: () RP. 15.000.000 – RP. 20.000.000
: () >RP. 20.000.000

B. Petunjuk Pengisian :

Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan perasaan, pendapat dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya.

Keterangan Jawaban	Tingkat Penelitian
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Ragu-Ragu (R)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

1. Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan					
2.	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri					
3.	Wajib pajak harus menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
4.	Sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak					
5.	Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin luas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku					

2. Tingkat Pemahaman *System Self Assesment*

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Wajib pajak memiliki kemampuan menghitung wajib pajak dengan benar					
2.	Wajib pajak harus mempunyai kemampuan untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT)					
3.	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan					
4.	Wajib pajak diwajibkan melunasi pajaknya dalam tahun berjalan.					
5.	SPT merupakan alat untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang					
6.	Wajib pajak harus melaporkan pajak yang terhutang ke kantor pelayanan pajak (KPP)					
7.	Wajib pajak harus mempertanggungjawabkan atas jumlah pajak yang terhutang					

3. Tingkat penghasilan wajib pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutangnya					
2.	Semakin lama wajib pajak bekerja, maka penghasilan yang diterima semakin tinggi					
3.	Semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayar					
4.	Wajib pajak harus transparansi dalam melaporkan jumlah pajak yang terhutang					

4. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
2.	Saya berusaha untuk membayar pajak yang terhutang tepat waktu agar tidak mendapat sanksi administrasi					
3.	Setiap wajib pajak harus mendaptarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerjanya					
4.	Setiap pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak					
5.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela					
6.	Dengan membayar pajak berarti, saya secara tidak langsung ikut serta membantu pemerintah dalam usaha pembangunan nasional					
7.	Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan jumlah pajak yang terhutang					
8.	Setiap pengusaha wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP)					

UJI RELIABILITAS

1. Uji Reliabilitas Pengetahuan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,787	6

2. Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Sistem *Self Assesment*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,709	8

3. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
,785	5

4. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
,719	9

HASIL UJI REGRESI

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENGHASILAN , PENGETAHUAN, SELFASSESSMENT ^b		Enter

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 ^a	,425	,388	2,239

a. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SELFASSESSMENT

b. Dependent Variable: KESADARAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,634	3	56,878	11,347	,000 ^b
	Residual	230,586	46	5,013		
	Total	401,220	49			

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SELFASSESSMENT

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,513	4,142		3,504	,001
	PENGETAHUAN	-,022	,071	-,035	-,307	,760
	SELFASSESSMENT	,345	,148	,287	2,327	,024
	PENGHASILAN	,579	,144	,488	4,018	,000

a. Dependent Variable: KESADARAN

UJI VALIDITAS

1. Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

		Correlations					
		PWP ITEM 1	PWP ITEM 2	PWP ITEM 3	PWP ITEM 4	PWP ITEM 5	PENGET AHUAN
PWP ITEM 1	Pearson Correlation	1	,779**	,905**	,412**	,452**	,848**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,003	,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PWP ITEM 2	Pearson Correlation	,779**	1	,789**	,522**	,548**	,862**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PWP ITEM 3	Pearson Correlation	,905**	,789**	1	,547**	,495**	,890**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PWP ITEM 4	Pearson Correlation	,412**	,522**	,547**	1	,632**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PWP ITEM 5	Pearson Correlation	,452**	,548**	,495**	,632**	1	,669**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50
PEN GETA HUA N	Pearson Correlation	,848**	,862**	,890**	,708**	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Validitas Pemahaman Sistem *Self Assessment*

Correlations

		SSA 1	SSA 2	SSA 3	SSA 4	SSA 5	SSA 6	SSA 7	SELFASSESSMENT
SSA 1	Pearson Correlation	1	,209	,162	,336*	,166	,029	,105	,532**
	Sig. (2-tailed)		,146	,262	,017	,249	,840	,469	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 2	Pearson Correlation	,209	1	,226	,441**	,095	,036	-,053	,554**
	Sig. (2-tailed)	,146		,114	,001	,514	,804	,717	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 3	Pearson Correlation	,162	,226	1	,008	-,003	,128	-,175	,354*
	Sig. (2-tailed)	,262	,114		,958	,984	,375	,225	,012
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 4	Pearson Correlation	,336*	,441**	,008	1	,125	-,121	,247	,594**
	Sig. (2-tailed)	,017	,001	,958		,387	,404	,083	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 5	Pearson Correlation	,166	,095	-,003	,125	1	,518**	,394**	,566**
	Sig. (2-tailed)	,249	,514	,984	,387		,000	,005	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 6	Pearson Correlation	,029	,036	,128	-,121	,518**	1	,439**	,529**
	Sig. (2-tailed)	,840	,804	,375	,404	,000		,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SSA 7	Pearson Correlation	,105	-,053	-,175	,247	,394**	,439**	1	,521**
	Sig. (2-tailed)	,469	,717	,225	,083	,005	,001		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
SELFASSESSMENT	Pearson Correlation	,532**	,554**	,354*	,594**	,566**	,529**	,521**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,012	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Validitas Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Correlations

		TPWP 1	TPWP 2	TPWP 3	TPWP 4	PENGHASILAN
						LAN
TPWP 1	Pearson Correlation	1	,245	,378**	,024	,501**
	Sig. (2-tailed)		,087	,007	,867	,000
	N	50	50	50	50	50
TPWP 2	Pearson Correlation	,245	1	,543**	,394**	,832**
	Sig. (2-tailed)	,087		,000	,005	,000
	N	50	50	50	50	50
TPWP 3	Pearson Correlation	,378**	,543**	1	,505**	,864**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50
TPWP 4	Pearson Correlation	,024	,394**	,505**	1	,623**
	Sig. (2-tailed)	,867	,005	,000		,000
	N	50	50	50	50	50
PENGHASILAN	Pearson Correlation	,501**	,832**	,864**	,623**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

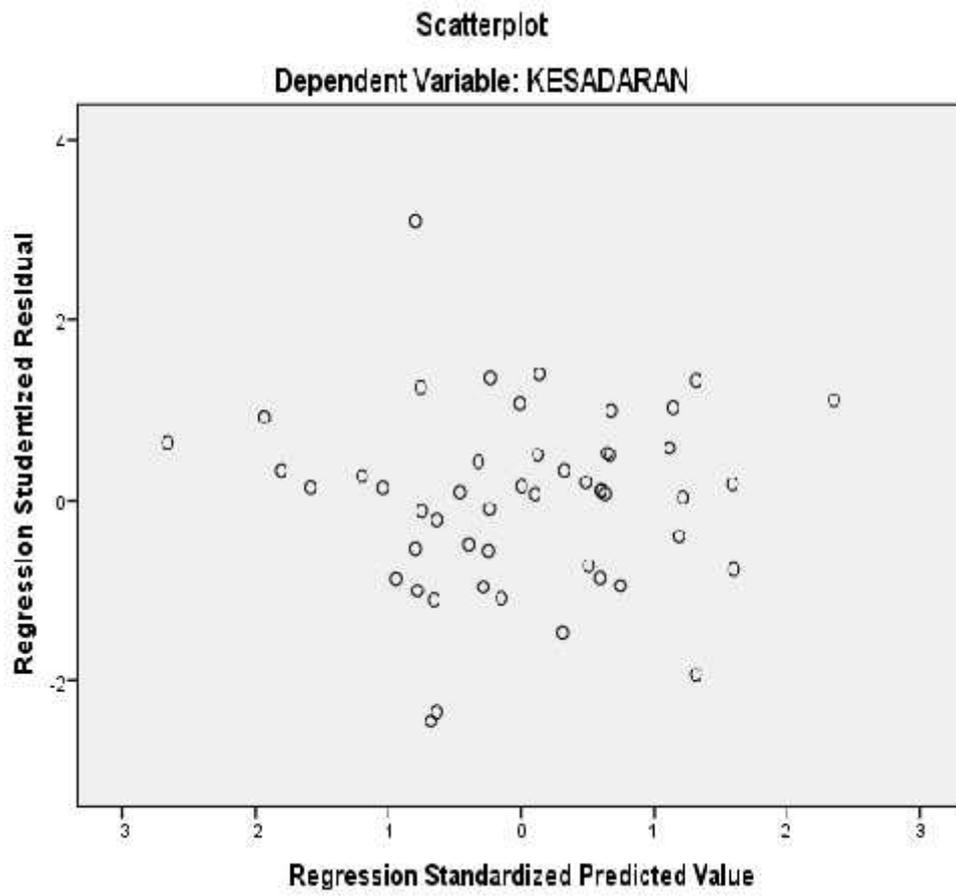
Correlations

	KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	KWP 6	KWP 7	KWP 8	KESADA RAN
KWP 1 Pearson Correlation	1	,451*	,137	,234	,386*	,436*	,441*	-,169	,658**
Sig. (2-tailed)		,001	,343	,102	,006	,002	,001	,241	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 2 Pearson Correlation	,451**	1	,040	-,080	,260	,226	,267	-,145	,384**
Sig. (2-tailed)	,001		,782	,580	,069	,114	,061	,316	,006
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 3 Pearson Correlation	,137	,040	1	,627*	,042	,087	,138	,405*	,574**
Sig. (2-tailed)	,343	,782		,000	,771	,549	,339	,004	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 4 Pearson Correlation	,234	-,080	,627*	1	,045	,146	,231	,291*	,595**
Sig. (2-tailed)	,102	,580	,000		,758	,313	,106	,041	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 5 Pearson Correlation	,386**	,260	,042	,045	1	,551*	,117	-,179	,560**
Sig. (2-tailed)	,006	,069	,771	,758		,000	,420	,214	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 6 Pearson Correlation	,436**	,226	,087	,146	,551*	1	,270	,011	,670**
Sig. (2-tailed)	,002	,114	,549	,313	,000		,058	,937	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 7 Pearson Correlation	,441**	,267	,138	,231	,117	,270	1	,079	,510**
Sig. (2-tailed)	,001	,061	,339	,106	,420	,058		,585	,000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KWP 8 Pearson Correlation	-,169	-,145	,405*	,291*	-,179	,011	,079	1	,309*
Sig. (2-tailed)	,241	,316	,004	,041	,214	,937	,585		,029
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KESAD ARAN Pearson Correlation	,658**	,384*	,574*	,595*	,560*	,670*	,510*	,309*	1
Sig. (2-tailed)	,000	,006	,000	,000	,000	,000	,000	,029	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

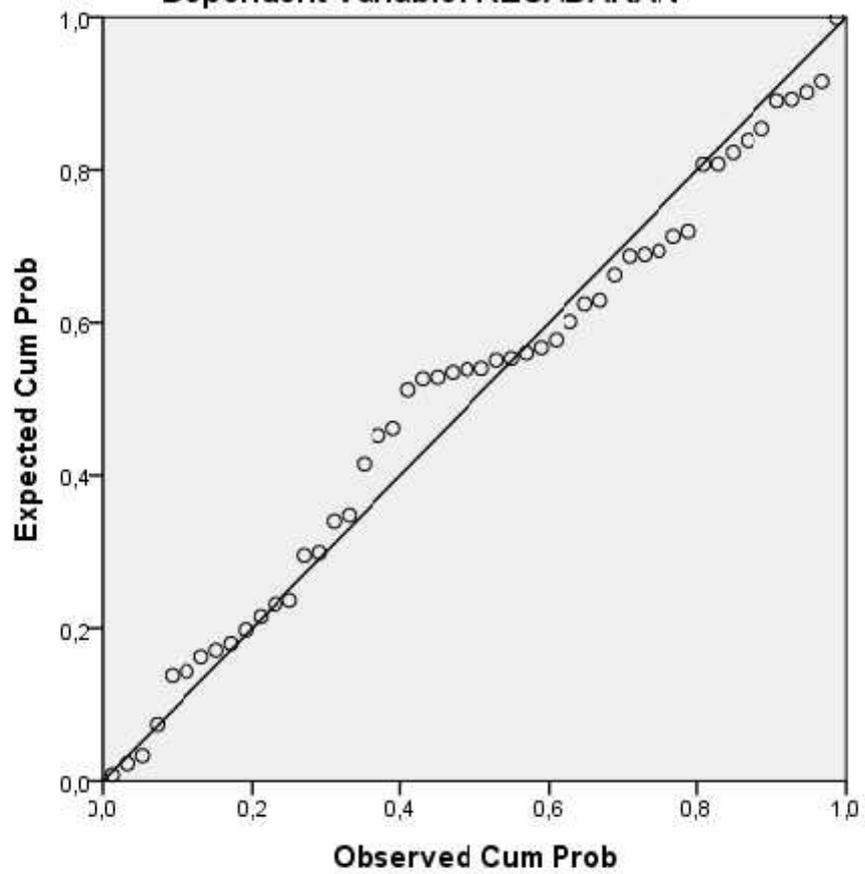
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: KESADARAN



Hasil Uji Persial X₁ Simultan

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENGETAHUA N ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: KESADARAN
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.007 ^a	.000	-.021	2.891

- a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	1	.020	.002	.961 ^b
	Residual	401.200	48	8.358		
	Total	401.220	49			

- a. Dependent Variable: KESADARAN
b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.746	1.797		18.784	.000
	PENGETAHUAN	-.004	.090	-.007	-.049	.961

- a. Dependent Variable: KESADARAN

Hasil Uji Persial X₂ Simultan

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PEMAHAMAN ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.216	.200	2.560

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.606	1	86.606	13.213	.001 ^b
	Residual	314.614	48	6.554		
	Total	401.220	49			

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.023	4.591		3.708	.001
	PEMAHAMAN	.559	.154	.465	3.635	.001

a. Dependent Variable: KESADARAN

Hasil Uji Persial Simultan X₃ Simultan

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENGHASILAN ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.598 ^a	.357	.344	2.318

a. Predictors: (Constant), PENGHASILAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.341	1	143.341	26.681	.000 ^b
	Residual	257.879	48	5.372		
	Total	401.220	49			

a. Dependent Variable: KESADARAN

b. Predictors: (Constant), PENGHASILAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.270	2.229		9.989	.000
	PENGHASILAN	.708	.137	.598	5.165	.000

a. Dependent Variable: KESADARAN

RIWAYAT HIDUP



ANDRIANI MUSABIR Lahir di Lara, kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara pada tanggal 10 Mei 1993, merupakan anak keempat dari pasangan Musabir dan Sitti. Memulai jenjang pendidikan pada tahun 1999 di SD Negeri 045 Lara Utama selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Baebunta selama 3 tahun. Selanjutnya menempuh pendidikan di sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Baebunta selama 3 tahun. Dan pada tahun 2011 melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan Akuntansi.